



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : BIRO PEMERINTAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DARMADI UTOMO**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**
3. NHK : **649633**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 741.761.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 479 m2/65 m2 di KOTA PONTIANAK , HIBAH TANPA AKTA Rp. 216.761.000
2. Tanah Seluas 517 m2 di KOTA SINGKAWANG , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/77 m2 di BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/98 m2 di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m2 di BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. Tanah Seluas 20000 m2 di BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah Seluas 20000 m2 di BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
8. Tanah Seluas 20000 m2 di BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
9. Tanah Seluas 20000 m2 di BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 273.700.000

1. MOTOR, VESPA PX 150 E Tahun 1985, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.000.000



2. MOTOR, KAWASAKI KZ-200 / BINTER Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA C1M02N42L0 A/T / SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.200.000
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5 ULTIMATE-X A/T Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	75.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	411.837.333
F. HARTA LAINNYA	Rp.	89.500.000
Sub Total	Rp.	1.592.598.333
III. HUTANG	Rp.	135.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.457.598.333

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.